

Analisis Perbandingan Persepsi dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri antara Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol terhadap Aliansi Pertahanan Korea Selatan – Amerika Serikat Tahun 2017-2022

Tasya Aryanti Santoso
Universitas AMIKOM Yogyakarta
tasyasantoso6116@gmail.com

Aditya Maulana Hasymi
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Yoga Suharman
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Seftina Kuswardini
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Abstrack — *This study compares the perceptions of foreign policy of the two South Korean leaders, Moon Jae In and Yoon Suk Yeol. The comparison of perceptions leads to the continuation of the defense alliance cooperation with the United States. The political transition is very visible in the two figures in building the progress of cooperation. Moon is known as a liberal-leaning political figure with a humanist style, so he is careful to establish two-way cooperation with the United States and North Korea to avoid threats to security stability in the region. Meanwhile, Yoon Suk Yeol is better known as a leader who represents conservatives as his political principle. Yoon is showing more aggressiveness to increase military strength with the United States in the face of North Korea's possession of nuclear weapons. This study uses the theory of Ole R. Holsti to understand the foreign policy perceptions of each figure which leads to output as foreign policy. There are three components to form a perception scheme in foreign policy, namely information, belief system, and perception. This study found that there are party interests and paradigm values in the belief system that have a strong influence in shaping the perceptions of Moon Jae In and Yoon Suk Yeol. This analysis also shows the contrast between regime shifts which show that both of them have a closed image and there is resistance to the continuation of policies in the previous regime so that the alliance cooperation with the United States experiences dynamics.*

Keywords: *Foreign Policy Perception, Democratic Party, People Power Party, United States*

I. PENDAHULUAN

Moon Jae In menjadi salah satu presiden Korea Selatan ke-12 mendukung konsep dan sistem liberalis, dilihat dalam keanggotaannya dalam Partai Aliansi Politik Demokrat. Ia dan pemerintahannya secara terbuka membuka pintu kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat hingga Korea Utara. Moon Jae In secara publik juga menyatakan negaranya mendukung program dan agenda denuklirisasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam pernyataan, Moon mendefinisikan Korea Selatan sebagai *responsible middle power*, “*As a responsible middle power that rose from the tragedy of war and has achieved economic development and democratization, Korea intends to make active contributions to world peace and stability*” (Moon 2017) (Bhiswara, 2018). Korea Selatan lebih bersikap hati-hati dengan menunjukkan *softpower* dalam berdiplomasi untuk menghindari sikap anarki yang mampu menimbulkan ancaman secara regional di lingkup global.

Dinamika pun terjadi bagaimana Korea Selatan diambang kedilemaan dalam mengurus dua hal, antara membangun aliansi pertahanan dengan agenda bersama denuklirisasi. Sejak 2018, Moon maupun Trump sepakat menangguk latihan militer dan memperkecil intensitas penggunaan aset strategis, dirancang untuk mendorong keberlanjutan negosiasi dengan Korea Utara yang menunjukkan hasil positif pasca Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang (Stangarone, 2022). Namun pada akhirnya, negosiasi berujung alot dan tidak mengarah pada hasil konkret pada KTT 2018 akibat sikap egoisme yang ditunjukkan Trump kepada Kim Jong Un. Ini disebabkan ketidaksepakatan antara urusan denuklirisasi dengan keringanan sanksi hingga menyebabkan sampai saat ini belum ada kemajuan nyata dalam denuklirisasi Korea Utara (Kim J. dkk, 2019).

Memasuki pergantian rezim di tahun 2022, Yoon Suk Yeol dikenal sebagai tokoh konservatif yang menunjukkan sikap agresivitas sebagai gaya kepemimpinannya. Hal ini telah terlihat dari pernyataan-pernyataan beliau dalam kesempatan kampanye sebelum terpilih sebagai presiden. Merujuk pada studi kasus, pernyataan Presiden Yoon sudah menunjukkan komitmen dan loyalitasnya untuk terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat di bidang militer. Pemerintah baru Korea Selatan saat ini mencoba bertindak jauh lebih tegas terhadap Pyongyang, meskipun diperkirakan akan terus menawarkan pembicaraan hubungan lintas batas. Pergeseran rezim terlihat jelas dari langkah awal Presiden Yoon melaksanakan kebijakan politik luar negerinya dalam melanjutkan kerjasama aliansi bersama Amerika Serikat. Dalam meningkatkan pertahanan, Presiden Yoon mengawali keberlanjutan latihan militer gabungan AS-Korea Selatan *Ulchi Freedom* yang secara drastis dikurangi intensitasnya atau ditangguk seluruhnya di bawah rezim Moon (Ryall, 2022).

Tujuan dari penelitian ini membandingkan dua pemerintahan antara

Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol, dalam perumusan kebijakan luar negeri atas kerjasama aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat tahun 2017-2022.

Program denuklirisasi dan latihan gabungan militer ROK-US *Ulchi Freedom* menjadi sorotan dalam memperhitungkan dinamika kerjasama yang cukup signifikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa terjadi perbedaan kebijakan antara Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol atas dua program aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat 2017-2022. Komponen dari persepsi dalam politik luar negeri juga menjadi tolak ukur, seperti, informasi, sistem keyakinan berupa fakta dan nilai, serta persepsi yang mengarah pada tindakan langsung, *decision foreign policy*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama dengan judul "Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Di Bawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara", Lestari dkk (2021) menekankan perbedaan kebijakan dari dua figur pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap prospek perdamaian diantara dua Korea. Lestari dkk menggunakan konsep Richard Snyder dalam merumuskan pengambilan kebijakan luar negeri internal dan eksternal setting. Konsep tersebut guna memetakan *decision making foreign policy* Park Geun Hye dan Moon Jae In selama menjabat Presiden dalam menghadapi keberadaan Korea Utara yang mengancam stabilitas keamanan nasional hingga kawasan atas kepemilikan senjata nuklir.

Pola dari penelitian Lestari dkk sekilas serupa dengan penelitian yang penulis kaji mengenai perumusan kebijakan luar negeri. Namun penelitian ini jelas berbeda dari segi penggunaan landasan teori dan pencetusnya sehingga kandungan komponennya juga berbeda. Selain itu, variabel dependen maupun independen berbeda dari segi subjek objek beserta periodenya. Penelitian tersebut mengkaji kebijakan Park dan Moon (2013-2020) menghadapi kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Sedangkan penelitian yang

penulis kaji mengenai kebijakan Moon dan Presiden Yoon (2017-2022) dalam menjalin hubungan kerjasama aliansi pertahanan dengan AS. Dari adanya perbedaan poin-poin yang dijelaskan, posisi penelitian penulis menjadi sebuah kelanjutan yang sifatnya berkesinambungan dari penelitian tersebut (Lestari dkk, 2021).

Malgorzata Wysocka (2012) dalam artikel "*The United States As The Guarantor of The Security For The Republic of Korea*", memperkenalkan peran penting Amerika Serikat dalam menjamin keamanan Korea Selatan. Wysocka mencoba menjelaskan bagaimana perjanjian pertahanan bilateral ini disepakati dan dilaksanakan hingga saat ini. *The U.S – ROK Status Forces Agreement* (1966) atau SOFA, menjadi sebuah perjanjian kerjasama dari adanya transfer pasukan sebagai kehadiran militer AS di Republik Korea. Kerjasama ini membuat AS membentuk *United States Forces Korea* (USFK) dalam menjamin keamanan Korea Selatan dari agresi eksternal. USFK terdiri dari tiga formasi utama, yakni angkatan darat atau *The Eighth U.S Army* (EUSA), angkatan udara atau *U.S Air Forces Korea* (*Seventh Air Forces, USAFK*), dan angkatan laut atau *U.S Naval Forces Korea* (CNFK).

Posisi dari penelitian ini adanya pembaruan dari salah satu program aliansi militer ROK-US yakni latihan gabungan militer yang diadakan secara anual. Konsistensi dari pelaksanaan program tersebut akan disoroti dalam penelitian ini sebagai tindak lanjut dalam memahami fenomena hubungan antar kedua negara dalam kerjasama yang diindikasikan mengalami dinamika (Wysocka, 2012).

Dalam menyoroti penyelenggaraan pemerintahan baru Korea Selatan di era baru oleh Presiden Yoon Suk Yeol, Jong Chul (2022) menulis artikel berjudul "*Tasks of North Korea Policy of The Yoon Suk-Yeol Government: Deja vu or a New Paradigm*". Penelitian tersebut menjelaskan mengenai fenomena perbedaan paradigma pemimpin Korea Selatan, terutama dalam memahami kiblat politik Yoon Suk Yeol dalam menjawab tantangan negaranya pada lima tahun ke

depan. Analisis ini membentuk pandangan visioner dalam memahami pola pemerintahan Yoon di masa depan. Jong Chul meyakini bahwa perubahan paradigma Pemerintah progresif (liberal) ke konservatif akan mempengaruhi keadaan dan situasi internasional di Semenanjung serta arah kebijakan terhadap Korea Utara.

Dari analisis ini, Jong Chul menyimpulkan bahwa paradigma baru dalam kebijakan Korea Utara sangat diperlukan untuk mengarah pada konsistensi politik dengan merangkul kubu progresif dan konservatif yang didukung oleh pemerintahan kooperatif, serta konsensus untuk menghubungkan pemerintah, partai politik dan masyarakat sipil.

Penelitian ini sekadar berfokus atas pergeseran rezim Korea Selatan yang berdampak pada konsistensi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi konflik dengan Korea Utara. Penjelasan berfokus pada faktor internal bukan eksternal, sehingga penelitian yang penulis kaji fokusnya berbeda dari sebelumnya dimana penulis juga akan menyoroti faktor eksternal seperti pengaruh Amerika Serikat sebagai yang utama, hingga Korea Utara dan Tiongkok pada momen tertentu juga turut memainkan peran dengan kekuatannya (Jong Chul, 2022).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan landasan teori Ole R. Holsti dalam memahami persepsi dalam politik luar negeri seorang pemimpin dari pendekatan psikologi (Sannit, 2018: 11). Sehubungan dengan teori, penulis menggunakan tiga komponen utama dalam memetakan perbandingan kebijakan luar negeri antar kedua tokoh, yakni informasi, sistem keyakinan berupa fakta dan nilai, serta persepsi. Komponen ini merupakan pola dari persepsi sebagai perumusan decision making kebijakan Moon Jae In maupun Yoon Suk Yeol (Holsti, 1962).

Pada dasarnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan untuk kemudahan penulis sebab peniadaan teknik perhitungan, tetapi lebih mengutamakan pada mutu,

kualitas, isi, ataupun bobot data dan bukti penelitian. Kecocokan kajian ini untuk menggunakan pendekatan tersebut menjadi relevan bagaimana rencana penulis memanfaatkan data secara empiris guna memvalidasi pernyataan penelitian. Selanjutnya metode komperatif digunakan penulis untuk membandingkan dua hal atau lebih objek penelitian dari berbagai aspek. Lebih spesifik, penelitian ini merupakan jenis metode komparatif diakronis, yakni membandingkan dua objek yang berbeda periodenya (Santosa, 2015:21-22).

Berkaitan dengan penggunaan metode komparatif, penelitian ini menjelaskan lebih jauh faktor-faktor pendukung yang membedakan persepsi politik luar negeri Moon Jae In maupun Yoon Suk Yeol, dalam membangun aliansi pertahanan dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Tentu keduanya memiliki perbedaan masing-masing tentang gaya kepemimpinan, apalagi kedua figur pemimpin berangkat dari partai politik dengan haluan paradigma yang berbeda. Untuk teknik pengumpulan data, penulis memanfaatkan multimedia dan textual analysis dalam penggunaan media cetak maupun elektronik sesuai kebutuhan penulis. Tentu periode dari pengambilan datanya pun berbeda. Pada persepsi dalam politik luar negeri Moon Jae In, rentang waktu yang digunakan yakni masa jabatan lima tahun yang sudah dilalui (2017-2022). Sedangkan persepsi dalam politik luar negeri Presiden Yoon Suk Yeol dari rentang waktu ia naik sebagai presiden pada Mei 2022 hingga akhir tahun 2022.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membandingkan output atau kebijakan luar negeri Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol pada pelaksanaan program kerjasama aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, penelitian ini menggunakan teori persepsi dalam politik luar negeri Ole R. Holsti. Adapun komponen-komponen yang dijadikan tolak ukur seperti informasi, sistem keyakinan, dan persepsi atas realitas.

Pada bab ini, penulis menemukan beberapa faktor sebagai alasan kemunculan

research question dari penelitian ini. Ada dua faktor utama, yakni kepentingan partai dan kebijakan terdahulu. Dua faktor ini yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan kebijakan antara Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol dalam pelaksanaan kerjasama aliansi pertahanan dengan AS pada periode 2017-2022.

Analisis ini memperlihatkan kontrasnya pergeseran rezim dalam politik luar negeri Korea Selatan yang terbagi dalam dua komunitas lembaga partai sesuai nilai yang dianut. Selain itu, analisis ini menunjukkan keduanya memiliki citra tertutup atas penolakan penerapan kebijakan di rezim sebelumnya.

Keuntungan Partai

Lembaga partai tentu memiliki kepentingan atas kontinuitas kebijakan negara. Salah satu yang terdampak berkaitan interaksi negara Korea Selatan dengan komunitas internasional. Ada perbandingan yang cukup kontras antara kepentingan DP (*Democratic Party*) dan PPP (*People Power Party*) dalam mengarahkan serta menempatkan negaranya untuk urusan foreign policy. DP sebagai partai pengusung Moon, memiliki identitas progresif yang menekankan kerjasama antar-Korea. Sedangkan PPP sebagai partai pengusung Presiden Yoon, memiliki identitas konservatif dengan menekankan kerjasama global serta penguat aliansi bersama Amerika Serikat.

Kedua lembaga partai menjadi background pemimpin yang dinilai penulis sebagai kandungan komponen yang turut memengaruhi persepsi dalam perumusan kebijakan luar negeri Moon dan Yoon untuk kesepakatan kerjasama pertahanan militer dengan AS.

Gambar 1. Perbandingan kepentingan terdahulu Partai DP dan PPP

	Progressive Governments	Conservative Governments
Goals of North Korea Policy	Managing division peaceful coexistence and de facto unification	Legislative and institutional unification, and unification preparation
Perceptions of North Korea	Acknowledging the North Korean system viewing North Korea as a subject for support and cooperation partner	Not acknowledging the North Korean system, viewing North Korea with vigilance and hostility
Characterization of Unification and North Korea Issues	Emphasizing the particularity	Emphasizing the universality
Priority of Nuclear Issues (Whether Political and Economic Efforts are in Sync)	Resolving nuclear issues and promoting inter-Korean cooperation at the same time or separating the two (separation of politics and economy)	Primarily resolving North Korea's nuclear issues (politics in sync with economy)
Characterization of the Principle of Reciprocity	Loose form of the principle of reciprocity	Rigid form of the principle of reciprocity
Approach and Policy Tools	Emphasizing engagement policy, incentives (economic incentives, security guarantee, acknowledgment of the system, establishment of diplomatic relations)	Emphasizing pressure policy, pressure tools (diplomatic pressure, economic sanctions, military demonstrations, etc.)
Preference between Inter-Korean Cooperation and International Cooperation	Prioritizing inter-Korean cooperation	Prioritizing international cooperation

Sumber: Park Jong Chul, Tasks of North Korea Policy of the Yoon Suk-yeol Government: Déjà vu or a New Paradigm. *International Journal of Korean Unification Studies*, 3(1), pp. 1-35

Democratic Party

Partai Demokrat Korea Selatan menjadi kekuatan dari kelompok masyarakat maupun pejabat politik yang memiliki pandangan ke arah progresif dalam sub liberal. Partai Demokrat Korea yang didirikan Kim Dae Jung pada 1995 memegang teguh terhadap nilai-nilai persamaan, perdamaian, serta kebebasan. Partai Demokrat dikenal sebagai partai kekuatan besar dengan anggota mayoritas menduduki Majelis Nasional. Agenda utamanya pun mengarah pada hubungan perdamaian dengan Korea Utara yang sejak lama diinginkan pemerintah maupun masyarakat Korea Selatan (Monday dan Rosyida, 2022).

Sejauh ini, nilai dari visi dan misi Partai Demokrat menjadi dasar penerapan nilai pemimpin liberal terdahulu seperti Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun, dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Sebagai partai yang menekankan hak asasi manusia, nilai-nilai, ekonomi, dan peningkatan hubungan antar Korea, Demokrat meyakini pemberlakuan diplomasi tanpa tekanan, menjadi misi atau praktik yang tepat untuk mendukung visi bagaimana perdamaian antar dua Korea tercipta. Partai Demokrat pun mendukung adanya pertukaran dan kerjasama lebih lanjut dengan Korea Utara. Didukung dengan pernyataan partai, Demokrat menyampaikan telah bersiap akan kemungkinan muncul ketegangan hubungan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat akibat kerjasama dua Korea yang mungkin saja bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat di era pemerintahan baru, Moon Jae In (Hayatunufus, 2022:49-50).

Moon Jae In merupakan mantan pemimpin Korea Selatan yang telah tergabung dalam Partai Demokrat sejak 2012. Naiknya Moon sebagai Presiden Korea Selatan di 2017, berhasil mengambil kendali dan memberikan pola politik baru setelah dua periode pemerintahan dipimpin konservatif. Kemenangan atas Moon kemudian menempatkan Partai Demokrat menjadi mayoritas di Majelis Nasional Korea Selatan, dengan menduduki jumlah kursi sekitar 120 dari 299 kursi parlemen (Hayatunufus, 2022:49). Sebagai partai dominan, kemungkinan besar kebijakan luar negeri yang ditempuh Moon akan dilaksanakan sesuai nilai-nilai partai dan disetujui serta didukung dewan parlemen yang didominasi dari kalangan partai yang sama. Kedudukan tersebut menjadi sinyal positif mendukung Korea Selatan melanjutkan misi perdamaian yang dilakukan pemimpin terdahulu, Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun melalui upaya pendekatan dalam membujuk Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi.

Perspektif publik atas naiknya Moon sebagai presiden membawa pendekatan yang lebih bersifat damai dengan Korea Utara. Ini yang membuat seorang pejabat AS menyatakan kemenangan Moon bisa menambah ketidakstabilan hubungan dengan Washington. Pejabat AS mulai mempertanyakan keberlanjutan pengerahan sistem THAAD dan pendekatan Korea Selatan dengan Korea Utara

di era Moon. Hal yang dipertanyakan diindikasikan muncul dari pernyataan-pernyataan Moon dalam pidato kemenangan pemilu 2017 (CNN Indonesia, 2017).

Sebagaimana pidato kemenangan Moon pada Mei 2017:

"I will not rest until peace is settled on the Korean Peninsula. I will fly to Washington, Beijing and Tokyo, if needed, and I will also go to Pyongyang, if conditions are met. I will strengthen the South Korea-U.S. alliance while seriously negotiating with the U.S and China to resolve the Terminal High Altitude Area Defense missile system issue."

(Moon Jae In, 2017) (Ko Dong-hwan, 2017).

People Power Party

People Power Party (PPP) atau Partai Kekuatan Rakyat merupakan salah satu partai politik Korea Selatan berhaluan konservatif. Partai ini merupakan partai kedua terbesar setelah Demokrat yang duduk mendominasi Majelis Nasional.

Sesuai tipe paradigmanya, partai ini memiliki prinsip kuat dalam mempertahankan nilai terdahulu untuk mengendalikan perubahan besar atas negaranya. Partai ini juga dikenal sangat ketat atas hubungan timbal balik.

Pemerintahan konservatif telah dikenal memiliki kekakuan dalam memandang Korea Utara sebagai sistem yang tidak sah sekaligus memandang Korea Utara dengan kewaspadaan dan permusuhan (Jongchul, 2022). Pemimpin terdahulu yang merepresentasikan perilaku konservatif sebagai kepentingan partainya yakni Lee Myung Bak dan Park Geun Hye.

Dibanding Demokrat, Partai Kekuatan Rakyat menganut prinsip pentingnya mengutamakan kerjasama internasional. Berbeda dengan Demokrat, PPP menggunakan *diplomatic pressure*, dan tegak akan sanksi ekonomi dan militer yang diberikan Korea Utara. Partai ini juga menggabungkan antara urusan politik dan ekonomi dalam prioritas mengatasi isu nuklir. Prinsip dan karakteristik tersebut menjadi kecenderungan pemimpin dari

partai ini melakukan kebijakan luar negeri sesuai nilai dari kepentingan keanggotaan partai (Jongchul, 2022).

Di tahun 2022, menjadi era dimana kendali pemerintahan Korea Selatan kembali ke tangan kelompok konservatif. Pada pemilu tahun tersebut, posisi Presiden Korea Selatan berhasil diambil Yoon Suk Yeol atas kemenangan tipis melawan kubu Demokrat, Lee Jae Myung. Kemenangan Yoon menjadi sinyal eksplisit bagi negara-negara yang terlibat dalam masalah regional Asia Timur, atas era baru bergesernya kebijakan Korea Selatan. Sudah diperkirakan bahwa pemerintahan Yoon, akan membawa negaranya bergerak jauh ke sisi AS dengan mendefinisikan Korea Utara sebagai musuh utama. Selama kampanyenya pun, Yoon berjanji bahwa pemerintahannya nanti akan memperkuat aliansi militer ROK-US dengan pembaruan program-program sebelumnya (Shin, 2022).

Yoon mengancam upaya Moon di rezim lalu atas dialog dan pendekatan yang mengarah pada perilaku tunduk pemerintahan Korea Utara. Proses politik luar negeri yang telah dilakukan Moon telah merusak aliansi ROK-US. Dalam pernyataannya, Yoon menekankan berlakunya kembali kebijakan lama pemerintah konservatif, atas kebijakan peningkatan kemampuan pertahanan diri Korea Selatan dan aliansi militer ketat dengan AS untuk mencegah ancaman rudal Korea Utara. Sesuai prinsip partai atas sinkronisasi antara politik dan ekonomi, Yoon memilih untuk menjanjikan terlebih dahulu bantuan ekonomi dalam menopang kesejahteraan Korea Utara setelah denuklirisasi mencapai keabsahan. Selain itu, Yoon juga melibatkan komunitas internasional dalam menyelesaikan agenda denuklirisasi.

Hal ini sesuai dengan pernyataannya pasca berhasil menduduki Presiden Korea Selatan Mei 2022 lalu.

"If North Korea genuinely embarks on a process to complete denuclearization, we are prepared to work with the international community to present an audacious plan that will vastly strengthen North Korea's economy and improve the quality of life for its people"

(Yoon Suk Yeol, 2022) (Shin, 2022).

Kebijakan Terdahulu

Pada Juli 2016, Korea Selatan di bawah pemerintahan Park Geun Hye menyetujui kebijakan misil Amerika Serikat dengan menandatangani persetujuan kerjasama THAAD. THAAD merupakan sebuah sistem pertahanan canggih milik perusahaan Lockheed Martin Amerika Serikat dan dikembangkan di Korea Selatan. Tujuan diproduksinya THAAD untuk menghalau rudal balistik yang mengancam atau dikenal dengan fase "terminal". THAAD bekerja dengan menggunakan energi kinetik (hit to kill technology) dimana sistem ini akan menembakkan misil yang datang dan meledakkannya di udara. Pengesahan pengembangan THAAD yakni sebagai sebuah tindakan perlindungan diri akibat meningkatnya ancaman uji coba nuklir ke empat Korea Utara pada Januari 2016 (Elvira, 2022).

Pembangunan THAAD merupakan bagian dari kepentingan keamanan Korea Selatan dalam menangkal ancaman serangan nuklir. Kecemasan ini berawal bagaimana Korea Utara tengah gencar melakukan uji coba nuklirnya yang keempat pada 6 Januari 2016 terhitung dari tahun 2006. Uji coba nuklir yang dilakukan secara berkala tersebut dianggap Korea Selatan sebagai provokasi yang sangat serius. Menurut AFP (2016) sebagaimana pernyataan Park Geun Hye sebagai presiden kala itu, "The test is not only a grave provocation to our national security but also a threaty to our future and a strong challenge to international peace and stability" (Elvira, 2022).

Respon kontra muncul secara internal dan eksternal akibat disahkannya kebijakan pengembangan THAAD di Korea Selatan. Pengembangan THAAD mendapat pertentangan, baik dari masyarakat Korea Selatan maupun Pemerintah Korea Utara. Atas disetujuinya penempatan persenjatan antimisil tersebut, masyarakat Korea Selatan yang kontra kemudian menuangkan reaksi protes terhadap Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa negara tersebut sama

saja seperti Korea Utara yang setuju untuk menyulut peperangan di semenanjung. Mereka yang menentang pun memiliki sudut pandang bahwa pembangunan THAAD hanya mengancam keselamatan masyarakat Korea Selatan dibanding proteksi (Leofarhan dan Azzqy, 2018).

Serangkaian citra dari sistem keyakinan Moon, mempengaruhi bagaimana ia memiliki sudut pandang baru dalam melanjutkan politik luar negeri Korea Selatan. Melihat situasi politik luar negeri Korea Selatan di era Park Geun Hye yang kurang kondusif, Moon berupaya mengubah arah diplomasi negaranya. Pada hal ini, Moon dapat digolongkan memiliki citra yang tertutup.

Menurut Mas'ood (1989-21), citra tertutup ialah mengarah pada penolakan terhadap informasi yang bertentangan dengannya serta memilih beberapa bagian tertentu dari informasi tersebut untuk mendukung citra yang sudah ada (Elvira, 2022). Dengan citra yang telah dibangun, mendukung Moon memiliki persepsi untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sebagai prioritasnya.

Di awal pemerintahan Moon, ia sudah menyoroti berbagai konflik diplomatik pada politik luar negeri Korea Selatan. Salah satunya pada kasus pengembangan THAAD yang menimbulkan banyak resiko termasuk pada aspek keamanan. Kemudian ini yang membuat Moon menganggap kebijakan Park Geun Hye atas pembangunan sistem anti-rudal THAAD mengganggu urusan politiknya untuk mengikat dua Korea. Selain merespon kebijakan pengembangan THAAD yang penuh resiko, Moon juga menyoroti bagaimana keberlanjutan agenda denuklirisasi yang belum menemukan titik terang dalam mencapai non-proliferasi nuklir di semenanjung.

Pembatalan pengembangan THAAD pada 2017, menjadi kebijakan awal Moon dalam menekan ketegangan militer dan diplomatik di kawasan. Moon juga mendeteksi adanya penurunan di bidang ekonomi dan pariwisata antara negaranya dan Tiongkok akibat pembangunan THAAD. Akibatnya THAAD dianggap sebagai kesepakatan kerjasama

pertahanan yang penuh resiko akibat dampak yang diberikan. Penghentian pengembangan terminal anti misil tersebut sangat kontras dengan pengesahan Three No's Policy mengenai tidak ada pemasangan THAAD tambahan, tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil Amerika Serikat, dan tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral dengan AS dan Jepang. Sehingga pada pemerintahan Moon, pada 31 Oktober 2017 melalui Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Wha menyampaikan secara resmi bahwa Korea Selatan menghentikan pengembangan sistem THAAD (Elvira, 2022).

Penutupan THAAD juga didukung atas gugatan Trump yang menambah keruh hubungan kerjasama. Diketahui Trump pada 2017 sebelum adanya keputusan status non-aktif THAAD, menggugat bayaran sebesar \$1 miliar terhadap Pemerintah Korea Selatan atas pembangunan THAAD. Gugatan tersebut dengan cepat ditolak Pemerintah Korea Selatan sebab negaranya telah menyepakati penyediaan tanah dan fasilitas pendukung sedangkan AS berperan menanggung biaya pemasangan, operasi dan pemeliharaan sistem THAAD. Sengketa THAAD maupun kebijakan *Three No's Policy* tentu berpengaruh besar terhadap stabilitas kerjasama aliansi pertahanan dan retaknya persekutuan Seoul – Washington (VOA Indonesia, 2017).

Di tahun berikutnya, pada 2018 Moon Jae In mulai memanfaatkan pendekatan sosial dan budaya dalam membangun ruang negosiasi yang kooperatif bersama Korea Utara. Tak memungkiri, tentu Semenanjung Korea memiliki kesamaan bahasa hingga budaya dan beberapa diantaranya masih mempertahankan budaya satu sama lain. Kesamaan budaya dan etnisitas menjadi sebuah privilege yang hanya dimiliki Korea Selatan dalam membangun komunikasi yang baik dengan Korea Utara. *Privilege* tersebut dimanfaatkan Moon Jae In dalam membangun sikap kooperatif satu sama lain di ruang negosiasi. Pemahaman konsep identitas etnis menjadi penting dalam mencegah konflik dan menjaga stabilitas

persatuan dan kesatuan (Widodo, 2019).

Pada hakikatnya, *ethnic identity* lahir dari salah satu komponen sebagai penyalur konsep tersebut. Lingkungan (keluarga) menjadi komponen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan pemahaman *ethnic identity*. Memiliki pemahaman *ethnic identity* menjadi suatu keharusan untuk masyarakat bahkan pemimpin agar terwujud toleransi sehingga stabilitas persatuan dan kesatuan terjaga (Widodo, 2019).

Dalam memahami fakta dari latar belakang Moon Jae In, ayahnya merupakan seorang pengungsi Korea Utara yang memilih untuk menetap di Korea Selatan. Moon menjadi salah satu pemimpin yang memiliki pemahaman konsep *ethnic identity* dalam praksis membangun komunikasi yang positif. Latar belakang keluarga Moon sangat kontras hubungannya dengan Korea bagian utara dan diindikasikan menyalurkan konsep *ethnic identity* terhadap Moon. Konsep *ethnic identity* menjadi pondasi bagaimana Moon mempunyai persepsi yang lebih moderat dalam mengelola negaranya di lingkup global bersama Korea Utara.

Praksis Moon dalam memegang teguh atas identitas “Korea satu”, diimplementasikan dalam penggunaan kata “*uri minjok*”. Konsep ini yang digunakan Moon selama berdialog dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dalam menyoroti permasalahan identitas Korea selama ini. Praksis ini merupakan bagian dari definisi diplomasi dalam hal seni yang dimaksudkan sebagai istilah untuk pelaksanaan suatu hubungan dalam bernegara (Arjlia, 2019:24).

Respon yang didapat pun positif dari pemimpin Kim sehingga penelitian terdahulu mencatat selama tiga pertemuan puncak antar-Korea di 2018, baik Moon maupun Kim sering menggunakan kata *minjok* (etnis) dari sejumlah pernyataannya secara publik. Dapat dikatakan konsep identitas etnis tersebut menjadi sebuah rujukan baru yang cukup berhasil dalam melakukan pendekatan dengan Pemerintah Korea Utara pada isu etnisitas (Kim J dan H. Sanghwa, 2020).

Kelanjutan dari penggunaan konsep tersebut menghasilkan pola kerjasama antar-

Korea. Langkah tersebut agak tricky mengingat level sanksi isolasi ekonomi yang masih berlaku untuk Korea Utara. Kelanjutan negosiasi hingga kesepakatan kerjasama menghasilkan kerjasama yang lebih komprehensif. Mulai dari pemulihan komunikasi antar militer Korea hingga pelaksanaan Deklarasi Panmunjon, menjadi implementasi untuk menekankan *reconnect the blood relations* antar-Korea. Kepentingan-kepentingan Moon untuk mengikat kembali dua Korea secara humanis menjadi target nyata yang telah dicapai sepanjang tahun 2018 dari adanya pertemuan KTT antar-Korea (Arjlia, 2019:70-72).

Dialog dan pengesahan Deklarasi Panmunjom dalam upaya denuklirisasi, nyatanya berdampak negatif bagi stabilitas dan konsistensi kerjasama aliansi pertahanan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Sebagaimana pendekatan Moon terhadap Pemerintah Korea Utara, ia memutuskan bersama Amerika Serikat untuk menanggihkan program latihan gabungan militer aliansi ROK-US *Ulchi Freedom Guardian* yang seharusnya diadakan secara anual. Ini disampaikan langsung Pentagon bahwa operasi *Ulchi Freedom Guardian* yang diagendakan pada bulan Agustus 2018 dibatalkan dalam mendukung KTT AS - Korea Utara membahas denuklisasi. Begitupun Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan Korea Selatan dan Amerika Serikat telah sepakat menanggihkan semua kegiatan perencanaan mengenai latihan militer *Freedom Guardian* dan tidak ada keputusan yang dibuat tentang latihan ROK-US lainnya (McCurry, 2018).

Program Latihan Gabungan Militer Tahunan *Ulchi Freedom Guardian* ROK-US Alliance yang sudah dilaksanakan sejak 2008, menjadi salah satu bentuk nyata adanya perjanjian SOFA antara Korea Selatan dan AS. Konsistensi dari pelaksanaan program ini harus terhambat dan dikorbankan sebab kesepakatan pemimpin kedua negara memilih untuk menanggihkan serta menghapus program tersebut.

Penanggihan tersebut datang dari pernyataan keraguan Korea Utara pada 16 Mei 2018 untuk menunda rencana KTT antar-Korea sebab pelaksanaan program latihan militer gabungan *Max Thunder* ROK-US yang dianggap sebagai provokasi militer yang disengaja (Hancocks, 2018).

Selain itu, Moon juga memutuskan untuk menurunkan skala penggunaan aset senjata aliansi kedua negara. Ini dilakukan demi membangun ruang diplomasi damai tanpa menunjukkan ambisi pada peningkatan kapabilitas militer dihadapan negosiatornya. Lalu pada 2019, Korea Selatan dan AS sepakat untuk mengakhiri latihan militer bersama "*Freedom Guardian*" berlaku untuk tahun selanjutnya sebagai bagian dari upaya mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea. Menhan AS Patrick M. Shanahan dan Menhan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo menyetujui penghentian latihan bersama tipe *Freedom Guardian* (Dagyum, 2019).

Pada pemerintahan Moon Jae In dan Donald Trump, keduanya di analisa tidak terlalu baik dalam mengolaborasi cara pandang serta perilaku yang menyebabkan kerjasama bilateral di bidang keamanan bersifat pasif. Trump disinyalir kecewa dengan presiden baru Korea Selatan, Moon Jae In yang menggunakan cara diplomasi damai terhadap nuklir Korea Utara. Kekecewaan tersebut jelas berasal dari pembatalan sejumlah agenda kerjasama ROK-US dengan klaim sebagai jalan pendekatan Pemerintah Moon terhadap Korea Utara. Pengamat dinamika keamanan kawasan Asia Timur menilai kehadiran AS selalu dianggap sebagai sebuah ganjalan bagi hubungan yang lebih harmonis, sehingga ini juga dianggap menjadi penyebab terhambatnya progres negosiasi damai dengan agenda denuklirisasi Korea Utara (Al Syahrin, 2018:57-58).

Dinamika tersebut tentu saja tak menguntungkan bagi Amerika Serikat dalam memberikan pengaruh dan dominasi negaranya terhadap Korea Selatan. *Pretise* yang dibangun selama ini oleh AS dihadapan mata dunia khususnya negara-negara kawasan Asia Timur, kemungkinan menurun sebab fenomena tersebut. Dan dari segi kapabilitas

angkatan militer, Korea Selatan tentu juga mengalami penurunan pada progresivitas kemiliterannya bersama pasukan AS. Dapat dicermati bahwasannya kerjasama antara Moon dan Trump tidak memiliki titik temu yang progresif atau asinkron pada intensitas kerjasama militer. Keduanya di analisa tidak terlalu baik dalam mengolaborasi cara pandang serta perilaku yang menyebabkan kerjasama bilateral di bidang keamanan bersifat pasif.

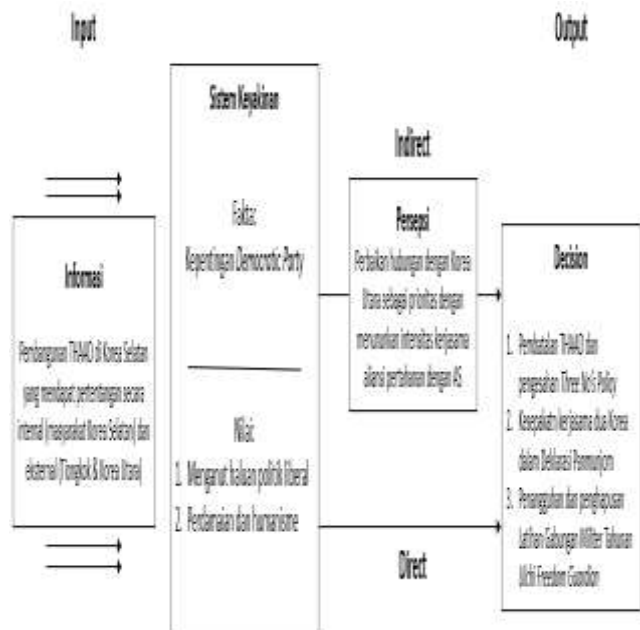
Memasuki 2021, pergeseran rezim AS dengan presiden terpilih Joe Biden, turut mewarnai dinamika hubungan ROK-US yang sebelumnya menurun. Hubungan diplomatik ROK-US mengalami sedikit peningkatan di tahun terakhir masa jabatan Moon. Biden menegaskan komitmen AS untuk memberikan pencegahan yang lebih luas dengan menggunakan berbagai kemampuannya.

Biden pun menyatakan pihaknya akan memperkuat postur penangkalan aliansi, berbagi pentingnya mempertahankan kesiapan militer bersama, dan menegaskan kembali komitmen tegas terhadap transisi kontrol operasional masa perang (White House, 2021).

Peningkatan hubungan kerjasama di akhir masa jabatan Moon mengarah pada reaktivitas penguatan postur aliansi militer kedua negara. Pidato Moon juga disoroti menjelang pertemuan perdana ia dengan Biden pada 2021 lalu. Langkah awal Moon sudah terlihat ingin mendorong lebih AS untuk terlibat dalam agenda denuklirisasi meskipun Biden menunjukkan sedikit minat untuk Korea Utara sebagai prioritas utamanya. Ini menjadi selaras bagaimana Moon terus berupaya menerapkan nilai dari partai politik untuk terus mengagendakan perdamaian bersama Korea Utara.

“I will consider the remaining one year of my team to be the last opportunity to move from an incomplete peace toward one that is irreversible. Now, the time for long deliberations is also coming to an end. It is time to take action”.

(Moon Jae In, 2017) (Cha Sangmi dan Shin Hyonhee, 2021).



Gambar 2. Skema persepsi dalam politik luar negeri Moon Jae In Tahun 2017-2022

Memasuki tahun 2022, pergantian rezim atas naiknya Presiden Yoon Suk Yeol menandai kembalinya era pemerintah konservatif. Antara Moon-Trump dan Yoon-Biden sebenarnya memiliki kesamaan titik temu dari nilai partai yang dianut. Partai Demokrat menjadi partai pengusung Biden yang menunjukkan pentingnya perubahan dalam menggebrak nilai-nilai lama atau secara singkat disebut liberal. Hal itu merupakan sisi berlawanan dari nilai kepentingan ideologi partai Yoon. Namun menariknya, antara Yoon dengan Biden, keduanya memiliki persepsi yang seragam dalam memandang kerjasama pertahanan secara bilateral, sehingga hubungan kedua negara cenderung harmoni.

Kekuatan militer menjadi pendekatan yang digunakan Yoon Suk Yeol dalam urusan politik luar negerinya. Sesuai janji kampanye, Yoon berupaya meningkatkan kapabilitas militer negaranya dengan Amerika Serikat yang intensitasnya sempat menurun di era Moon. Melanjutkan pernyataan tersebut, penelitian ini mengindikasikan adanya perilaku Yoon ke arah balance of power dalam upaya deterensi nuklir. Menurut Yadaf (2022), untuk menghindari ancaman yang dapat menimbulkan kehancuran sebuah kota dan penduduknya, diperlukan langkah pencegahan dengan membangun kekuatan yang sepadan. Praktis

deterensi nuklir atas peningkatan postur kekuatan militer yang digunakan Yoon merujuk pada strategi Amerika Serikat dalam menghadapi peningkatan minat terhadap senjata nuklir diantara negara-negara indo-pasifik.

Salah satu media menyebut Yoon Suk Yeol sebagai perfect partner Biden di Korea Selatan. Dalam waktu kurang dua bulan setelah Yoon dilantik, Yoon dinilai sejalan dengan Presiden AS Biden dalam kebijakan luar negeri. Selama pertemuan puncak di 2022, diskusi dua pemimpin di dominasi pembahasan keamanan sehingga media menyebut di tahun-tahun itu menjadi era emas dalam aliansi ROK-US. Yoon dan Biden sepakat untuk memperluas cakupan dan skala latihan gabungan militer untuk mencegah potensi bgb agresi (Grossman, 2022). Tak butuh waktu lama untuk kedua pemimpin mengolaborasikan pandangannya dalam merumuskan langkah strategi atas keamanan Asia Timur secara regional, khususnya di bidang kerjasama militer serta menghadapi isu proliferasi nuklir Korea Utara.

Kepentingan geopolitik Amerika Serikat terdeteksi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam perumusan politik luar negeri Yoon Suk Yeol. Sejak bulan Mei, pemerintahannya telah berfokus pada normalisasi pengoperasian sistem yang dimiliki dan dioperasikan AS. Awal pemerintahannya, Yoon sudah melangkah jauh dengan bersikeras mengaktifkan kembali pengembangan anti misil THAAD di negaranya. Klaim awal Yoon melihat sistem THAAD merupakan kunci untuk melawan rudal Korea Utara. Yoon juga mengklaim pihaknya terbuka untuk menjadi tuan rumah unit tambahan sistem THAAD yang dikembangkan Amerika Serikat. Yoon dan pemerintahan juga mengkritik Moon Jae In atas pengesahan Three No's Policy yang melemahkan kekuatan Korea Selatan dalam membangun aliansi yang lebih kuat dengan AS (Hankyoreh, 2022).

Agenda reaktivitas THAAD dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dengan Ketua Komite Tetap

Kongres Rakyat Nasional China Li Zhanshu pada Agustus 2022. Pada pertemuan, pihak Yoon mengakui THAAD hanya merupakan cara pertahanan diri negaranya dan tak bermaksud untuk melawan kekuatan Tiongkok. Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan Yoon untuk menyerukan bahwa pertahanan misil THAAD diharapkan tidak menjadi hambatan dalam hubungan biltateral Korea Selatan dan Tiongkok. Dalam pertemuan, pihak China, Li Zhanshu tetap menyebut masalah THAAD mengganggu kepentingan keamanan negaranya. Selain itu, Li juga menyatakan langkah AS tidak substansial dalam menyelesaikan agenda denuklirisasi, justru hanya memperkuat kapabilitas militernya dengan negara mitra seperti Korea Selatan dan Jepang (KBS World, 2022).

Yoon Suk Yeol bahkan menyatakan Korea akan menyetujui lebih banyak penerapan THAAD dan jika diperlukan membeli baterai THAAD sendiri. Selain itu, Yoon juga mengatakan pihaknya tidak akan mematuhi Three No's Policy yang disahkan bersama Tiongkok di tahun 2017, dan menilai kesepakatan tersebut bukan kesepakatan resmi yang bersifat formal (Sarah Kim, 2022). Dan dari pembatalan kesepakatan tersebut, memungkinkan lebih banyak alat pertahanan misil yang dikerahkan AS untuk dikirim ke negara sekutu dalam penanggulangan isu keamanan secara regional. Meskipun demikian, pernyataan Departemen Pertahanan AS dan pasukan ROK-US (USFK) berulang kali mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk implementasi seperti yang dinyatakan Yoon (Hankyoreh, 2022).

Langkah yang terlalu jauh dari pernyataan Yoon, menjadi perdebatan secara internal yang menyebabkan pernyataan tersebut hanya sebatas retorika. Menanggapi klaim sepihak Yoon atas THAAD, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan pada akhirnya memberi pengarahan kepada Yoon tentang rencana Korean Air and Missile Defense (KAMD) pada Juli 2022 sebagai misil baru dari pembaruan THAAD. Pernyataan pejabat Kemenhan Korea Selatan pun menjelaskan jika pengembangan KAMD dilaksanakan dengan cepat, maka THAAD tidak diperlukan kembali

(Hankyoreh, 2022). Pernyataan publikasi Yoon tentang THAAD terkesan terlalu gesa mengambil langkah tanpa perundingan serta persetujuan dahulu dari kedua belah pihak (ROK-US).

Dalam hal peningkatan skill angkatan militer Korea Selatan, pada 22 Agustus 2022 telah dimulainya kembali program latihan gabungan militer aliansi ROK-US dalam skala besar. Setelah empat tahun mengurangi serta menghapus program tersebut dengan tujuan untuk mendorong negosiasi dengan Korea Utara, secara resmi Yoon melakukan normalisasi program *Ulchi Freedom* yang diadakan di musim panas. Nama Ulchi sendiri berasal dari *Ulchi Mundeok*, seorang pemimpin militer awal Korea yang melawan invasi Tiongkok ke Dinasti Shi pada abad ke tujuh (Wysocka, 2012). Saat itu, ROK-US sepakat untuk memperbaiki nama program yang semula *Ulchi Freedom Guardian* (UFG) menjadi *Ulchi Freedom Shield* (UFS), dengan tujuan menyoroti integrasi pemerintah Korea Selatan (United States Forces Korea, 2022).

Program Freedom Shield diikuti oleh beberapa pasukan, diantaranya *Combined Forces Command* (CFC), *United States Forces Korea* (USFK), *United Nations Command* (UNC), dan komando komponen di bawah CFC. CFC sendiri merupakan main team yang dibentuk tahun 1978, menggantikan UNC dalam memainkan peran utama pertahanan sebagai pasukan siap tempur dan kendali atas pasukan ROK (Cordesman dan Ayers, 2017).

Program latihan gabungan militer tersebut berupa simulasi komputer selama 11 hari. Acara berorientasi pada pertahanan yang dirancang untuk meningkatkan postur pertahanan gabungan ROK-US, menjaga kesiapan, dan memperkuat keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea & Asia Timur Laut. Dimulainya kembali latihan militer dengan skala besar dipandang sebagai keharusan dalam meningkatkan kesiapan militer, walaupun kemungkinan akan tetap menjadi titik pertikaian dalam program nuklir Korea Utara (Stangarone, 2022).

Dalam pelaksanaan program, nampaknya Korea Selatan menunjukkan kontribusi lebih besar, sebab program ini dipimpin Jenderal Korea Selatan. Pada pelaksanaan program ini, Jenderal Ahn Byung Seok, wakil komandan CFC memimpin sebagai Future CFC Commander. Komandan dan wakil komandan CFC akan beralih tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian *Full Operational Capability* (FOC) selama UFS sebagaimana telah disepakati secara bilateral oleh Menhan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada Desember 2021. Ini merupakan kesempatan besar bagi Korea Selatan, khususnya bagi Jenderal Ahn Byung Seok sebagai perwakilan tokoh militer negaranya untuk memimpin program kemiliteran bersama AS dalam skala besar. Secara spesifik Jenderal Ahn dan Pawl J. La Camera, komando UNC/CFC/USFK bertukar tugas kepemimpinan berdasarkan konstruksi *The Future – Combined Forces Command* sebagaimana digariskan oleh kedua Menhan akhir tahun 2021 lalu (United States Forces Korea, 2022).

Pihak Amerika Serikat dalam mendefinisikan UFS adalah sebagai contoh terbaru dari komitmen kuat AS untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut. Amerika Serikat juga menyatakan bahwa CFC, USFK, dan UNC menerapkan pedoman Covid-19 dan tindakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah ROK-US untuk melindungi pasukan dan menjaga kesiapan tempur. Pernyataan-pernyataan tersebut dipublikasi secara resmi oleh lembaga *United States Forces Korea* dalam official website.

Sementara itu UFS juga diharapkan media mencakup latihan tradisional seperti pelatihan garis depan bersama, simulasi menghilangkan senjata pemusnah massal, latihan serangan kapal induk bersama, dan pelatihan pendaratan amfibi. Program ini juga diketahui telah diperbarui untuk mencerminkan serta memahami beberapa taktik baru atas kasus invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Selain itu, pelaksanaan juga mencakup pelatihan respons gabungan militer-sipil terhadap serangan terhadap fasilitas infrastruktur sipil utama (Stangarone, 2022).

Ditandai dengan pengadaan kembali latihan gabungan militer *Ulchi Freedom Shield* sebagai komitmen AS dengan Korea Selatan untuk membangun aliansi yang kuat dalam menyusun strategi berperang, menjadi pengakuan bahwa negara super power tersebut akan mengerahkan kekuatan negaranya untuk dielaborasi dengan kekuatan negara mitranya Korea Selatan. Yoon juga menyatakan dalam pertemuan ia membahas kemungkinan pengerahan aset militer strategis, seperti alat misil. Agenda ambisius tersebut menjadi strategi Yoon dalam membangun kekuatan yang sepadan atas kekhawatiran adanya invasi dari Korea Utara. Secara eksplisit, Yoon menunjukkan adanya praktis *balance of power* dengan pendekatan *hard diplomacy* bersama Amerika Serikat.

Serupa dengan kesepakatan Moon-Biden di tahun 2021, Presiden Yoon dan Presiden Biden menegaskan kembali komitmen bersama terhadap pertahanan Republik Korea dan postur pertahanan gabungan di bawah Perjanjian Pertahanan ROK-US. Di tahun 2022, Biden menekankan perluasan pangkalan pertahanan di wilayah Korea Selatan dengan penggunaan berbagai kapabilitas pertahanan AS, termasuk kemampuan pertahanan nuklir, konvensional, dan rudal. Antara Biden dan Yoon juga menyetujui reaktivitas sedini mungkin Grup Strategi dan Konsultasi Pencegahan tingkat tinggi. Kedua pemimpin berkomitmen untuk lebih memperkuat memperkuat postur pertahanan gabungan sebagai langkah preventif, dan menegaskan kembali komitmen untuk transisi kontrol operasional masa perang dengan menyesuaikan kondisi terkini. (White House, 2022).

Penyesuaian kondisi bertujuan mempertimbangkan ancaman yang berkembang ditimbulkan Korea Utara. Sehingga kedua pemimpin juga menyepakati pengerahan aset militer AS dalam waktu yang tepat dan terkoordinasi dengan baik sebagaimana nantinya diperlukan. Tentu pengerahan aset militer tersebut di bawah komando dan wewenang pemerintah Biden.

Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menjadi strategi yang disepakati kedua negara dalam mengidentifikasi langkah-langkah baru sebagai tambahan memperkuat kebijakan preventif dalam menghadapi aktivitas destabilitas Korea Utara (White House, 2022).

Langkah-langkah yang telah disepakati menjadi daya tarik bagaimana kemungkinan di lima tahun mendatang, pada kepemimpinan Yoon, kerjasama pertahanan secara bilateral ROK-US kemungkinan akan melangkah secara progresif untuk terus menciptakan strategi ambisius. Memungkinkan juga bahwa keberadaan alat misil AS secara mapan menjadi jaminan keamanan Korea Selatan, walaupun tugas dan wewenang sebagian besar di bawah komando AS. Ini menjadi babak baru bagaimana ketegangan kembali muncul di kawasan Asia Timur atas kekuatan dan kepentingan AS dalam memainkan perannya merangkul negara mitra Korea Selatan setelah lima tahun terakhir pretisanya mengalami kemunduran.

Yoon Suk Yeol secara gamblang menunjukkan keinginan bangsanya menjadi negara penting di level global. Yoon memiliki lebih banyak perspektif global untuk melibatkan komunitas internasional dalam menghadapi ketakutan dan kekhawatiran atas kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Sehingga peran AS dalam kesepakatan membangun aliansi yang kuat, menjadi main point dalam kebijakan luar negeri Yoon. Terlepas dari pendekatan *hard way* sebagai gaya diplomasi Yoon dalam urusan politik luar negerinya, Yoon bersama Biden juga setuju tentang perlunya membuka pintu kembali untuk negosiasi di masa depan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Yoon dan Biden memandang penting komunitas global dengan sepakat untuk memulai solidaritas dan kerjasama yang erat di antara negara-negara yang berpikiran serta berbagi nilai yang sama tanpa pengecualian negara mana pun (Grossman, 2022).

Untuk menghadapi Korea Utara, Yoon lebih tegas terhadap sanksi proliferasi nuklir yang masih berlaku. Penekanan diberikan Pemerintah Korea Utara untuk mengesahkan serta menyanggupi program denuklirisasi

sebagai langkah nyata membangun perdamaian abadi di semenanjung. Perundingan atas dua Korea seharusnya tidak hanya menjadi pertunjukkan politik, namun harus ada kontribusi yang substantif dari kedua pihak. Sehingga agenda pun dapat mencapai keabsahan maupun diimplementasikan secara kesinambungan.

dan Yoon Suk Yeol menyebabkan kiblat dari target tujuan foreign policy kedua pemimpin berbeda. Moon dengan *democratic party* menganggap kerjasama antar-Korea akan menciptakan hubungan yang damai dengan tujuan menekan ketegangan militer di wilayah semenanjung. Arah kerjasama juga berdasar untuk menghubungkan dua wilayah atau unifikasi sehingga agenda perdamaian dapat mencapai target. Nilai-nilai tersebut nyata diterangkan oleh Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan periode 2017-2022. Sepanjang periode tersebut, Moon secara gamblang terus berupaya melakukan pendekatan kooperatif dengan Korea Utara dengan kesepakatan kerjasama seperti dalam *Deklarasi Panmunjom*. Prioritas atas kebijakan tersebut menyebabkan adanya penurunan signifikan atas pembatalan sejumlah program kemiliteran ROK-US seperti pembatalan THAAD serta pengesahan *Three No's Policy* hingga penangguhan dan penghapusan program *Freedom Guardian*. Sehingga kecenderungan politik luar negeri Moon lebih mengarah pada agenda perdamaian dan denuklirisasi dibanding membangun aliansi yang lebih kuat dengan AS.



Gambar 3. Skema persepsi politik luar negeri Yoon Suk Yeol tahun 2022

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menunjukkan adanya kecenderungan perdebatan dua kelompok besar dalam komunitas pejabat politik Korea Selatan yang terbagi berdasarkan paradigma. Kerangka berpikir Ole R. Holsti atas persepsi dalam politik luar negeri dianggap menjadi tolak ukur yang kuat dalam melakukan validasi adanya fakta tersebut.

Melalui pemahaman perumusan kebijakan luar negeri Moon dan Yoon, penulis menemukan adanya dua faktor utama yang melatar belakangi munculnya perbedaan signifikan atas pelaksanaan kerjasama pertahanan bersama Pemerintah AS. Dua faktor tersebut terdiri dari kepentingan partai dan kebijakan terdahulu yang sudah dikelompokkan berdasarkan landasan teori.

Kepentingan partai antara Moon Jae In

Bergeser pada rezim Yoon Suk Yeol, ia menyoroti atas penurunan kerjasama Rok-US alliance. Ini tentu berlawanan dengan kepentingan Yoon berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki lembaga partai. *People Power Party* menekankan adanya komunitas eksternal dengan memprioritaskan kerjasama internasional. Arah dan target kebijakan perlu melibatkan aktor internasional dalam mencapai agenda sekaligus menunjukkan kekuatan yang mapan di level global. Yoon menjadi Presiden Korea Selatan yang turut juga menyelaraskan penerapan nilai-nilai partai politik dengan kebijakan. Yoon berusaha keras untuk mereaktivitas segala program yang ditangguhkan bahkan dihapuskan dari pemerintahan sebelumnya. Yoon sepatat untuk mengerahkan alat misil milik AS ke wilayah negaranya dengan klaim sebagai pertahanan diri. Yoon juga telah menyepakati pelaksanaan program Guardian Shield pada Agustus 2022 lalu.

Cukup menjadi langkah yang progresif bagaimana Yoon di awal pemerintahan

sudah meningkatkan kembali kapabilitas militer negaranya bersama AS dalam tiga bulan pertama. Menghadapi Korea Utara, Yoon lebih bertindak tegas dibanding Moon pada sanksi militer yang masih berlaku atas proliferasi nuklir. Ia menekankan untuk Pemerintah Utara berkontribusi nyata pada pelaksanaan agenda denuklirisasi. Sehingga perdamaian substantif bisa tercapai di Semenanjung Korea hingga Asia Timur Laut.

Hasil perbandingan menunjukkan antara Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol jelas menampakkan pemberlakuan nilai-nilai paradigma dan keadaan realitas dari kebijakan terdahulu, sehingga berpengaruh kuat terhadap perumusan kebijakan luar negerinya. Dari perbedaan gaya kepemimpinan tersebut, terselip adanya keselarasan atau kesamaan suatu hal. Antara dua pemimpin sama-sama memiliki citra tertutup dalam memandang kebijakan terdahulu sebagai komponen informasi/pengetahuan.

Moon Jae In menolak adanya keberlanjutan kebijakan Park Geun Hye, begitupun Yoon Suk Yeol menolak adanya kontinuitas dari kebijakan Moon Jae In.

REFERENSI

- [1] Al Syahrin, M. Najeri. 2018. *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Sleman: Komoyo Press
- [2] Arjlia, Annisa. 2019. *Kepentingan Korea Selatan Dalam Deklarasi Panmunjom Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In*. Surabaya: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- [3] Bhiswara, Bara. 2018. Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis Terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae-In 2017-2018. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), pp. 206-224
- [4] Cha, Sangmi dan Shin Hyonhee. 2022. S.Korea's Moon Says 'Time to take Action' On N.Korea Ahead of Summit With Biden [Online]. Available at: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skoreas-moon-says-looking-nkorea-response-peace-talks-2021-05-10/> [Accessed: 1 June 2023]
- [5] CNN Indonesia. 2017. Dorong Dialog dengan Korut, Moon Jae-In Jadi Presiden Korsel [Online]. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510061958-113-213664/dorong-dialog-dengan-korut-moon-jae-in-jadi-presiden-korsel> [Accessed: 15 May 2023]
- [6] Cordesman, A. H. dan Charles Ayers. 2017. *The Military Balance in The Koreas and Northeast Asia*. Center for Strategic and International Studies
- [7] Dageum, Ji. 2019. U.S., South Korea Agree To End Freedom Guardian Joint Military Drill [Online]. Available at: <https://www.nknews.org/2019/06/u-s-south-korea-agree-to-suspend-freedom-guardian-joint-military-drill/> [Accessed: 20 May 2023]
- [8] Dong-hwa, Ko. 2017. Moon Jae-In's Inauguration speech [Full Script] [Online]. Available at: <https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=229150> [Accessed: 11 May 2023]
- [9] Elvira, Nadya. 2022. Dilema Aliansi Keamanan Korea Selatan-Amerika Serikat: Studi Kasus Penempatan THAAD di Korea Selatan. *Frequency of International Relations*, 3(2), pp. 71-102
- [10] Grossman, Derek. 2022. Yoon Suk-yeol is Biden's Perfect South Korea Partner [Online]. Available at: <https://www.rand.org/blog/2022/07/yoonsuk-yeol-is-bidens-perfect-south-korea-partner.html> [Accessed: 1 June 2023]
- [11] Hancocks, Paula. 2018. Did These US-South Korean Military Drills Cause Kim's Change of Heart? [Online]. Available at: <https://amp.cnn.com/cnn/2018/05/25/asia/us-south-korea-max-thunder-drills-intl/index.html> [Accessed: 18 May 2023]
- [12] Hankyoreh. 2022. Outmoded As Security System, THAAD Retains Rhetorical Utility In Korea [Online]. Available at: https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1059976.html [Accessed: 31 May 2023]
- [13] Hayatunufus. 2022. Perubahan Instrumen Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Presiden Moon Jae In. Malang: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang

- [14] Holsti, Ole R. 1962. The Belief System and National Images: A Case Study. *The Journal of Conflict Resolution*, 6(3), pp. 244-252
- [15] Jongchul, Park. 2022. Tasks of North Korea Policy of The Yoon Suk-Yeol Government: Deja vu or a New Paradigm. *International Journal of Korean Unification Studies*, 31(1), pp. 1-35
- [16] KBS World Indonesia. 2022. Presiden Yoon Berharap THAAD Tidak Jadi Hambatan Hubungan Korsel-China [Online]. Available at: https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=68168 [Accessed: 31 May 2023]
- [17] Kim, J. James dan H. Sanghwa. 2020. Moon's Foreign Policy Priorities in Word and Deeds. *ASAN Institute for Policy Studies*
- [18] Kim, J. James dkk. 2019. South Korean Perceptions of The Denuclearization of North Korea. *ASAN Institute for Policy Studies*
- [19] Kim, Sarah. 2022. Yoon Tells China's No.3 Official That THAAD Shouldn't Hinder Relations [Online]. Available at: <https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/09/18/national/politics/Korea-Yoon-Sukyeol-KoreaChina/20220918161238760.html> [Accessed: 1 June 2023]
- [20] Leofarhan dan Azzqy. A. A. Rahman. 2018. Kerjasama Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam Penempatan THAAD Sebagai Respon atas Uji Coba Misil Balistik Korea Utara Periode 2013-2017. *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 2(2), pp. 103-114
- [21] Lestari, B. U. Septi dkk. 2021. Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Di Bawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), pp. 81-109
- [22] McCurry, Justin. 2018. Pentagon Cancels Freedom Guardian Military Drill With South Korea [Online]. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2018/jun/19/pentagon-cancels-freedom-guardian-military-drill-with-south-korea> [Accessed: 18 May 2023]
- [23] Monday, Puti Isnaeni dan H. N. Rosyida. 2022. Motif Moon Jae In Dalam Merekonsiliasi Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara Melalui Korean Peninsula Peace Initiative. *Al – Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), pp. 75-86
- [24] Ryall, Julian. 2022. Presiden Baru Korsel Coba Takyik Berbeda Terhadap Korut [Online]. Available at: <https://www.dw.com/id/presiden-baru-korsel-coba-taktik-berbeda-terhadap-korut/a-61127425> [Accessed: 7 February 2023]
- [25] Sannit, Amalia Sulfana. 2018. Konsistensi Angela Merkel Dalam Mempertahankan Kebijakan Pintu Terbuka Tahun 2015-2017. Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- [26] Santosa, Puji. 2015. Metodologi Penelitian Sastra: Paradigma, Proposal. Pelaporan, dan Penerapan. Yogyakarta: Azzagrafika
- [27] Shin, Mitch. 2022. At Inauguration, Yoon Suk-yeol Shows Approach to North Korea [Online]. Available at: <https://thediplomat.com/2022/05/at-inauguration-yoon-suk-yeol-shows-old-school-approach-to-north-korea/> [Accessed: 31 May 2023]
- [28] Shin, Mitch. 2022. What to Expect From Yoon Suk-yeol's Policy on North Korea [Available at: <https://isdp.se/publication/what-to-expect-from-yoon-suk-yeols-policy-on-north-korea/> [Accessed: 31 May 2023]
- [29] Stangarone, Troy. 2022. South Korea, US Return to Large-Scale Military Drills [Online]. Available at: <https://thediplomat.com/2022/08/south-korea-us-return-to-large-scale-military-drills/> [Accessed: 7 February 2023]
- [30] United States Forces Korea. 2022. CFC, USFK, and UNC Begin Ulchi Freedom Shield [Online]. Available at: <https://www.usfk.mil/Media/Press-Products/Press-Releases/Article/3136232/cfc-usfk-and-unc-begin-ulchi-freedom-shield/> [Accessed: 1 June 2023]
- [31] VOA Indonesia. 2017. Korea Selatan Tolak Bayaran \$1 Miliar Yang Diminta Trump [Online]. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/korea-selatan-tolan-bayaran-i-miliar-dolar-yang-diminta-trump/3829537.html> [Accessed: 15 May 2023]
- [32] White House. 2021. U.S.-ROK Leader's Joint Statement [Online]. Available at: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/21/u-s-rok-leaders-joint-statement/> [Accessed: 1 June 2023]

- [33] White House. 2022. United States-Republic of Korea Leaders' Joint Statement [Online]. Available at: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/21/united-states-republic-of-korea-leaders-joint-statement/> [Accessed: 6 May 2023]
- [34] Widodo. 2019. Pemahaman Identitas Etnik (Etnic Identity) Untuk Mengembangkan Toleransi Masyarakat Kota Metro Lampung. *Jurnal Foundasia*, 10(1), pp. 1-21
- [35] Wysocka, Malgorzata. 2012. The United States As The Guarantor of The Security For The Republic of Korea. *Strategic Review*, 2, pp. 137-154
- [36] Yadav, Abhiram Singh. 2022. Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.